

LAPORAN AKHIR

**SINKRONISASI PROGRAM DAN MONITORING
EVALUASI KEGIATAN BALAI PATP**



**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

1. **Judul Kegiatan** : Sinkronisasi Program Dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Balai PATP
2. **Unit Kerja** : Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
3. **A l a m a t** : Jl. Salak No. 22 Bogor
Tlp. 0251-8382567
Fax. 0251-8382567
e-mail : bpatp@litbang.pertanian.go.id
4. **Penanggung Jawab**
 - a. **N a m a** : Nurjaman, S.TP, MM
 - b. **Pangkat/Golongan** : Penata Muda Tk. I/IIIC
 - c. **Jabatan** :
 - c.1. **Struktural** : Kasie Pelayanan Alih Teknologi
 - c.2. **Fungsional** : -
5. **Status Kegiatan** : Lanjutan
6. **Jangka waktu** : Januari – Desember 2020
7. **Tahun Mulai** : 2011
8. **Lokasi Kegiatan** : Jawa dan Luar Jawa
9. **Biaya** : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
10. **Sumber Dana** : DIPA Balai PATP tahun anggaran 2020

Bogor, Desember 2020

Mengetahui :
Kepala Balai PATP



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 19641121 199103 1 001

Penanggung Jawab,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nurjaman', is written over the text.

Nurjaman, S.TP, MM
NIP. 198010262009011005

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai PATP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian. Laporan sinkronisasi program dan monitoring evaluasi Balai PATP ini merupakan pencapaian realisasi kegiatan dalam pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dan evaluasi program Balai PATP sampai dengan akhir tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan maupun evaluasi dalam upaya sinkronisasi penyusunan program Balai PATP di masa yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat, kritik dan saran kami harapkan dapat disampaikan dan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Bogor, Desember 2020
Kepala Balai,

Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 19641121 199103 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai PATP pada Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran DIPA sebesar Rp. 10.625.161.000,-. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19 dilakukan oleh seluruh Satker lingkup Balitbangtan sehingga pada bulan Mei anggaran Balai PATP menjadi Rp. 8.827.461.000,-. Kemudian pada bulan Juni anggaran Balai PATP kembali mengalami penghematan anggaran/refocusing yang berdampak pada target IKU Balai dan anggaran menjadi Rp. 6.583.336.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2020 terjadi penambahan anggaran yang bersumber dari PNPB royalty hasil alih teknologi sehingga DIPA Balai PATP meningkat menjadi Rp. 9.077.213.000,-. Sementara itu realisasi Belanja Balai PATP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.809.002.764,- atau 97,05% dari total anggaran. Kegiatan Balai PATP pada tahun 2020 berupa pengelolaan HKI dan perjanjian lisensi serta kegiatan pendukung lainnya telah memenuhi target yang diharapkan, baik dari segi penyerapan anggaran maupun output yang ditargetkan. Kinerja Balai PATP tersebut juga tercermin pada hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sangat baik.

EXECUTIVE SUMMARY

Balai PATP in the 2020 Fiscal Year has a DIPA budget of Rp. 10,625,161,000,-. The budget refocusing due to the Covid 19 pandemic was carried out by all Unit within the scope of IAARD so that in May Balai PATP budget was Rp. 8,827,461,000, -. Then in June Balai PATP budget experienced another budget savings / refocusing which impacted to the IKU target and the budget was Rp. 6,583,336,000, -. At the end of the 2020 fiscal year, there will be an additional budget originating from PNPB royalties from technology transfer so that the DIPA Balai PATP increases to Rp. 9,077,213,000, -. Meanwhile, the realization Balai PATP Expenditures as of December 31, 2020 was Rp. 8,809,002,764, - or 97.05% of the total budget. The activities of Balai PATP in 2020 in the form of IPR management and license agreements and other supporting activities have met the expected targets, both in terms of budget absorption and targeted output. The performance of Balai PATP is also reflected in the results of the very good Community Satisfaction Index (IKM).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
EXECUTIVE SUMMARY	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	4
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Indikator Keberhasilan.....	5
II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
2.1. Metodologi	6
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1. Program	16
3.1.1. Review Pelaksanaan dan Penajaman Program Tahun 2020	16
3.1.2. Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan 2020	17
3.1.3. Perencanaan Anggaran T.A. 2021.....	19
3.1.4. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja	19
IV. KESIMPULAN	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Judul kegiatan, keluaran dan besarnya alokasi dana Balai PATP tahun 2020	10
Tabel 2. Judul kegiatan, pagu dan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2020, berdasarkan revisi anggaran terakhir	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Peningkatan Alokasi Anggaran Balai PATP	3
Gambar 2. Mekanisme umum perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pertanian.....	6
Gambar 3. Aplikasi e-PK.....	7
Gambar 4. Aplikasi SAKTI	8
Gambar 5. Aplikasi i-Monev.....	8
Gambar 6. Aplikasi i-Program	8
Gambar 7. Aplikasi SMART DJA	9
Gambar 8. Aplikasi Monev Bappenas.....	9
Gambar 9. Aplikasi SAKIP	10
Gambar 10. Petikan DIPA T.A. 2020 (Revisi 6).....	18
Gambar 11. Tampilan aplikasi e-kinerja yang menggambarkan kinerja Balai PATP	21
Gambar 12. Perjanjian Kinerja dan Manual IKU untuk eselon 3 pada poin 1, dan eselon 4 pada point 2 serta 3	22
Gambar 13. Gambaran output dari indikator jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (invensi).....	23
Gambar 14. Capaian output dari indikator jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)	24
Gambar 15. Gambar pada bagian a, b, c di atas adalah rangkaian aplikasi e-sakip.....	26
Gambar 16. Gambar diatas menampilkan rangkaian update realisasi melalui aplikasi i-monev melalui SP2D, SPM dan realisasi kuitansi bendahara pengeluaran.....	28
Gambar 17. evaluasi serapan anggaran dari Ditjen Anggaran.....	29
Gambar 18. Update i – program	29
Gambar 19. Update Monev Bappenas	31

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan proposal (RPTP/RDHP) digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana anggaran yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sesuai dengan pagu indikatif, penyusunan konsep nota keuangan, penetapan pagu anggaran dan alokasi anggaran, penelaahan RKA-KL, sampai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Sebagai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi (pengkajian, perekayasa, dan diseminasi) apabila dihasilkan varietas, galur, prototype, data/informasi, peta, dan lain-lain maka kepemilikan hak atas kekayaan intelektual adalah milik Balitbangtan.

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis eselon III yang berada di bawah Balitbangtan, Kementerian Pertanian. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 29/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, Balai PATP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian. Berdasarkan tugas tersebut susunan organisasi Balai PATP terdiri atas : a) Kepala; b) Subbagian Tata Usaha; c) Seksi Pelayanan Alih Teknologi dan d) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Seksi Pelayanan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, serta perlindungan HKI, promosi, kerja sama alih teknologi, dan lisensi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian. Selanjutnya Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas Balai PATP yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai PATP

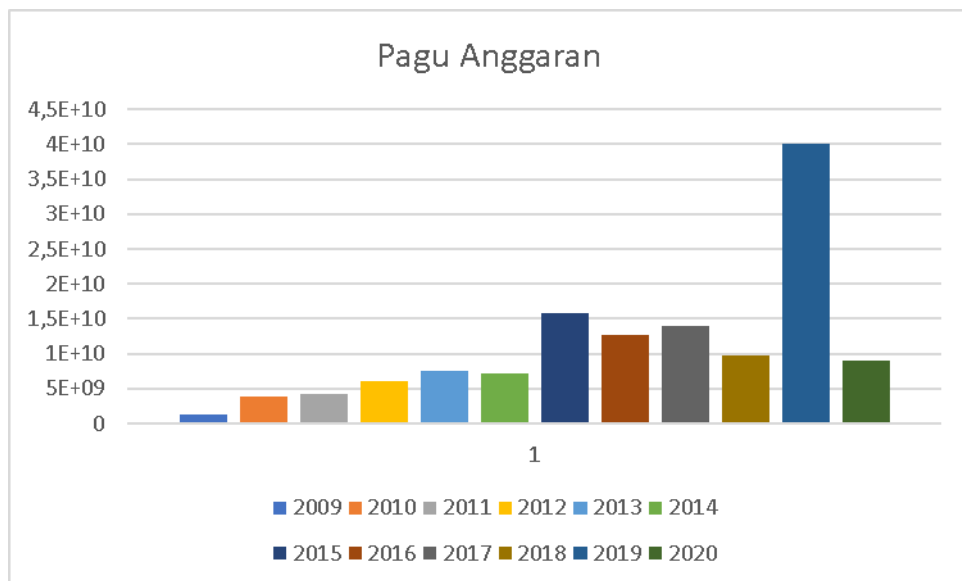
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada Balai PATP, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek (2010), dua diantaranya terkait dengan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha dalam bentuk lisensi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai PATP tahun 2019 adalah 55 invensi yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan 19 perjanjian lisensi antara Balitbangtan dan dunia usaha. HKI yang dikelola oleh Balitbangtan terdiri atas paten, cipta, merek, dan perlindungan varietas tanaman (PVT). Untuk tahun 2019 Balitbangtan telah berhasil mendaftarkan 107 pendaftaran HKI yang terdiri dari 71 pendaftaran Paten, 18 pendaftaran Cipta, 1 pendaftaran merek, dan 17 pendaftaran PVT. Total pendaftaran HKI sampai dengan akhir tahun 2019 ini adalah 809 pendaftaran HKI. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama lisensi telah dilakukan penandatanganan sebanyak 48 perjanjian, baik perjanjian baru maupun perpanjangan kerjasama lisensi.

Sesuai dengan tupoksinya yaitu mengelola HKI dan alih teknologi Balitbangtan, maka Balai PATP harus didukung dengan program kegiatan, SDM, sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai, sehingga dihasilkan teknologi inovatif (*succes story*) untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian, yang tercermin dalam peningkatan jumlah invensi yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan HKI dan peningkatan jumlah invensi yang dilisensikan ke dunia industri

Dalam rangka mendukung perannya yang sangat strategis, Balai PATP perlu mempunyai suatu program jangka pendek dan jangka panjang yang baik dan terarah. Renstra Balai PATP 2019-2024 disusun dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan sebagai program utama Balai. Dalam Renstra 2019-2024 tersusun output tahunan secara lengkap, namun karena kebutuhan informasi dan teknologi sangat cepat perkembangannya, maka diperlukan penajaman output kegiatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program Balai hendaknya dapat memfasilitasi berbagai

kegiatan yang mengarah pada perbaikan perencanaan kegiatan pengelolaan HKI dan alih teknologi termasuk penganggarnya.



Gambar 1. Gambaran Peningkatan Alokasi Anggaran Balai PATP

Balai PATP merupakan Unit Pelaksana Teknis Balitbangtan yang banyak bersentuhan langsung dengan pengguna dan para pemangku kepentingan pembangunan pertanian di berbagai tingkatan, terus dituntut untuk dapat menunjukkan secara nyata apa, bagaimana, dan dimana kegiatan yang telah dilaksanakannya, termasuk hasil-hasil kegiatan/program di lingkup Balitbangtan, khususnya dalam bidang pengelolaan HKI dan alih teknologi. Setiap kegiatan/program harus berbasis kinerja dan dikelola dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil-hasil kegiatan dan program tersebut hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan kegiatan yang sistematis dan terarah mengacu pada kebutuhan pengguna, adanya penggunaan manajemen operasional yang tepat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh dan komprehensif.

Kemajuan dan keberhasilan serta jaminan akuntabilitas (tanggung gugat) pelaksanaan kinerja suatu program perlu diukur melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan alat manajemen yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring merupakan kegiatan yang teratur dan berkesinambungan dan dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Data hasil monitoring dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan evaluasi lebih ditekankan pada suatu periode tertentu dalam suatu kurun waktu kegiatan dan diatur sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kegiatan, evaluasi digunakan untuk mengukur keragaan dan kualitas kemajuan penelitian serta keberhasilan penyelesaian kegiatan. Evaluasi dilakukan secara mendalam, menganalisis tentang kualitas dan relevansinya serta ketepatan terhadap rencana. Evaluasi menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan dan atau perencanaan berikutnya. Peningkatan program kegiatan serta penyediaan sumber daya perlu dibarengi dengan sistem monitoring dan evaluasi. Sistem tersebut akan membantu para pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dalam memantau dan mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang dikelolanya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Merumuskan output tahun 2020 ke dalam matrik dan proposal.
2. Menyusun rencana anggaran kegiatan T.A. 2021.
3. Menyusun proposal tahun 2021 siap diunggah ke i-program.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai PATP.
5. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Menyusun laporan tengah tahun dan tahunan Balai PATP.

Sasaran

1. Tersusunnya rumusan output tahun 2020 dalam bentuk matrik dan proposal.
2. Tersusunnya rumusan kebutuhan anggaran kegiatan T.A. 2021.
3. Menyusun proposal tahun 2021 siap diunggah ke i-program.
4. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai PATP.
5. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Tersusunnya laporan tengah tahun dan tahunan Balai PATP.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Sinkronisasi Program dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Balai PATP adalah: (1) melakukan review dan penajaman program/kegiatan tahun anggaran 2020, (2) merumuskan kebutuhan anggaran kegiatan T.A. 2021, (3) menyusun rencana kegiatan, pembahasan dan anggaran tahun 2021. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Balai PATP yang telah disusun sesuai dengan tupoksinya yaitu melakukan pengelolaan HKI dan alih teknologi.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersifat pembinaan dengan tujuan dan sasarannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan. Pelaksanaan kegiatan monev idealnya dilakukan selama tiga kali dalam setahun, yang meliputi monev perencanaan (*ex-ante*), monev pelaksanaan (*on going*), dan monev akhir kegiatan (*ex-post*). Hasil pelaksanaan kegiatan monev ini kemudian dituangkan menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dapat menunjukkan indikator keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan Balai PATP.

1.4. Indikator Keberhasilan

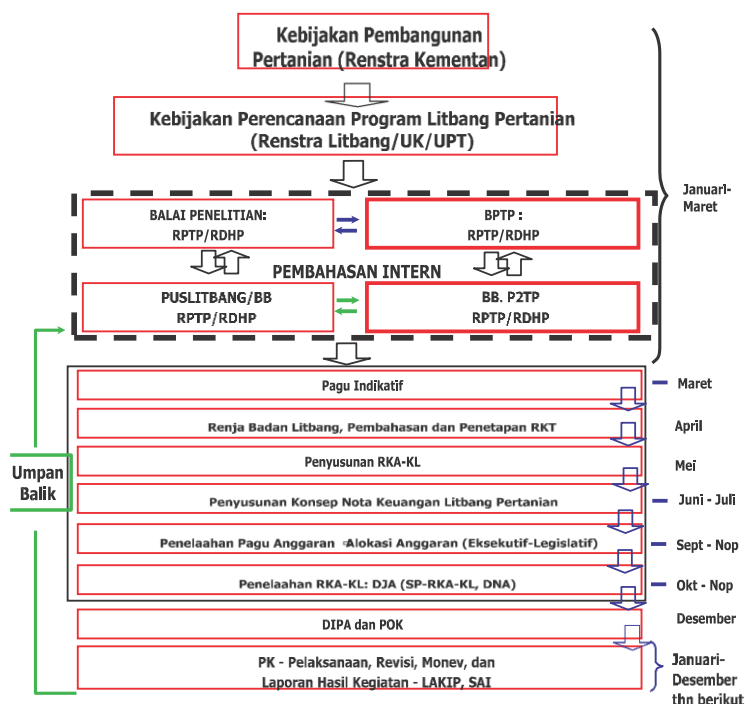
Yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Balai PATP adalah:

1. Tersedianya matriks dan proposal 2020 sesuai dengan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Rencana kebutuhan anggaran tahun 2020 tersusun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik itu perencanaan anggaran kegiatan dan ketepatan sesuai perencanaan, dan pelaksanaan, menurunkan tingkat penyimpangan dan kerugian negara serta meningkatnya akuntabilitas kinerja.
4. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel.
5. Terdokumentasinya laporan tengah tahun dan tahunan.
6. Terlaksananya kegiatan monev tahap *ex-ante*, *on going*, dan *ex-post* untuk semua kegiatan Balai PATP.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Metodologi

Mekanisme umum perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pertanian disajikan pada Gambar 2. Sedangkan format proposal mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman umum perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian.



Gambar 2. Mekanisme umum perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pertanian

Metodologi yang dipergunakan dalam kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program Balai meliputi :

1. Review Pelaksanaan dan Penajaman Program sebagai sistem perencanaan internal Balai PATP.
2. Perumusan dan pembahasan matriks kegiatan sebagai salah satu tahapan penjaringan isu dan upaya yang perlu dilakukan.
3. Perumusan dan pembahasan proposal program/kegiatan melalui seminar *Focus Group Discussion* sebagai upaya pematangan.

4. Penyusunan rencana anggaran belanja kegiatan berdasarkan keluaran dari butir 3.
5. Pelaporan.

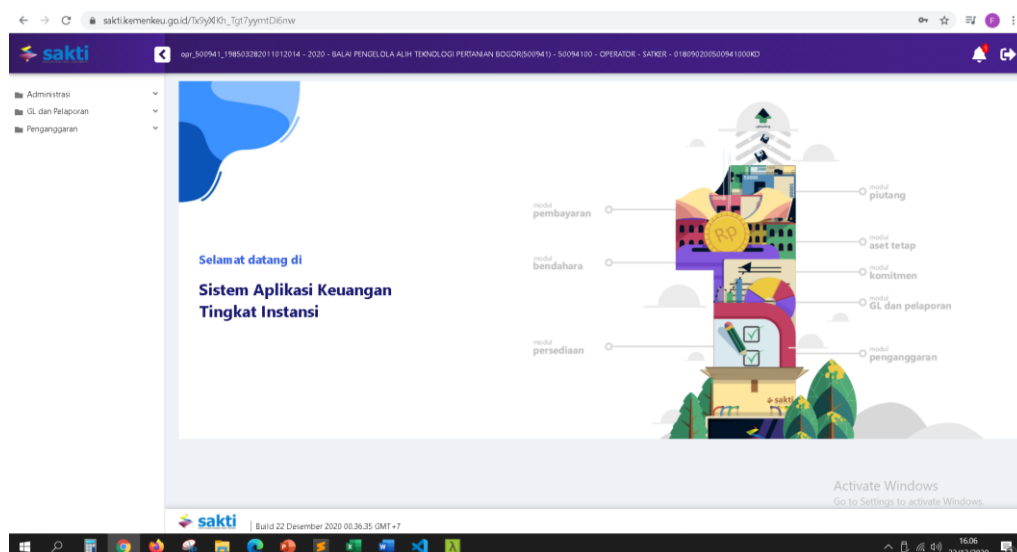
Seiring dengan tuntutan kemudahan dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi mulai tahun 2017 telah dirancang dan disosialisasikan penyusunan anggaran dan evaluasi saling terintegrasi. Berikut beberapa aplikasi yang digunakan dalam kegiatan penyusunan anggaran, evaluasi dan monitoring dari kegiatan yang dilaksanakan dilingkup Kementerian Pertanian :

1. Penyusunan Anggaran yang berbasis Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan masing-masing institusi melalui program KRISNA yang dikelola di BAPPENAS.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan e-PK bagi pejabat struktural di masing-masing institusi.



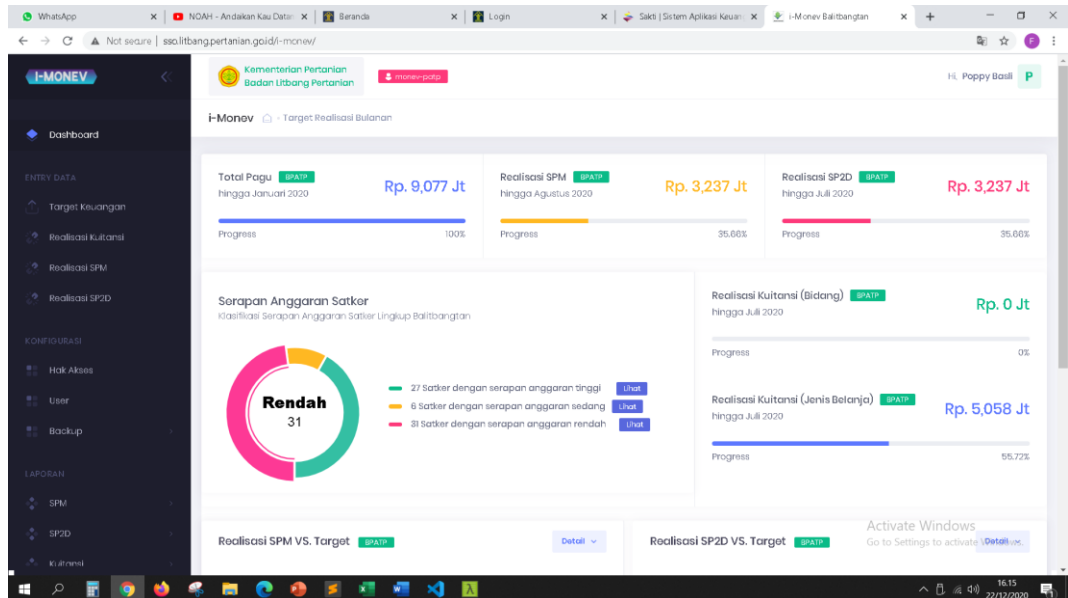
Gambar 3. Aplikasi e-PK

3. Penyusunan ADK untuk penyusunan anggaran atau revisi anggaran.



Gambar 4. Aplikasi SAKTI

- Update realisasi di aplikasi i-monev, berdasarkan realisasi kuitansi, SP2D dan SPM yang diisi setiap hari.



Gambar 5. Aplikasi i-Monev

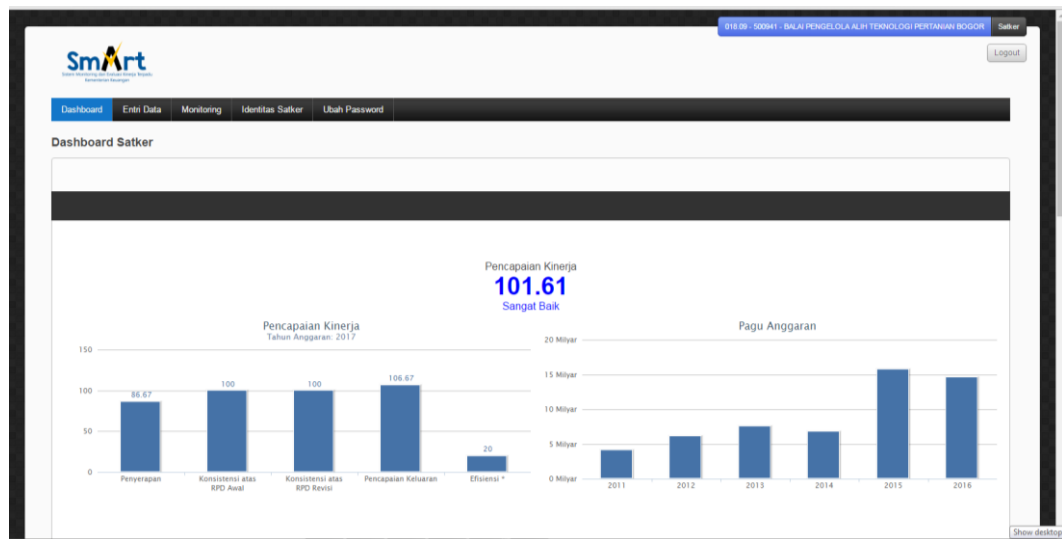
- Input rencana kerja pada aplikasi i-program yang diisi setiap 1 tahun sekali.

The screenshot displays the i-Program application interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, ENTRY DATA (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Judul), LAPORAN (Jenis Kegiatan, Jenis Belanja, Sumber Biaya, RBN, Proposal, Kegiatan Ulang), and KONFIGURASI (Hak Akses). The main content area shows 'Rencana Kerja' with a table of work plans.

No	Jenis	Tahun	Saktir	Tahapan	Judul	Biaya	Action
1	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2021.5 - Pengadaan Kendaraan Bermotor	353.700.000	[Icon]
2	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2021.3 - Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan	196.017.000	[Icon]
3	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2021.4 - Pengadaan Peralatan Pendukung AWR	300.000.000	[Icon]
4	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2021.15 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	220.500.000	[Icon]
5	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2014.14 - Layanan Perkantoran	3.860.000.000	[Icon]
6	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2021.2 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	239.800.000	[Icon]
7	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2015.13 - Koordinasi Pemanfaatan PNB	609.636.000	[Icon]
8	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2011.16 - Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Balai PATP	184.000.000	[Icon]
9	RKTM	2021	BPATP	UPT	161.2014.4 - Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Administrasi DIPA Balai PATP	180.500.000	[Icon]

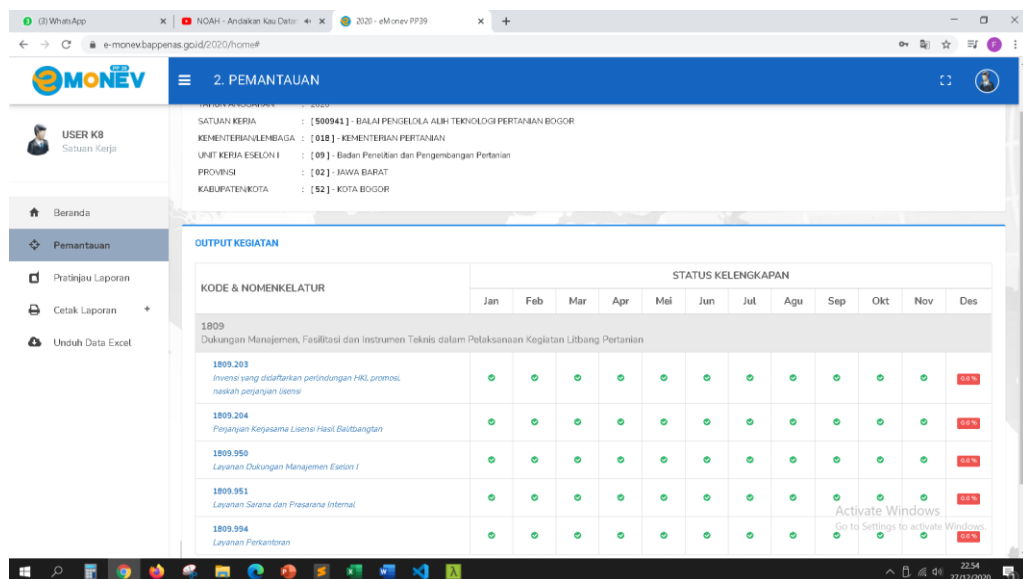
Gambar 6. Aplikasi i-Program

- Update capaian kinerja pada aplikasi monev DJA-Kemenkeu, setiap 1 bulan sekali.



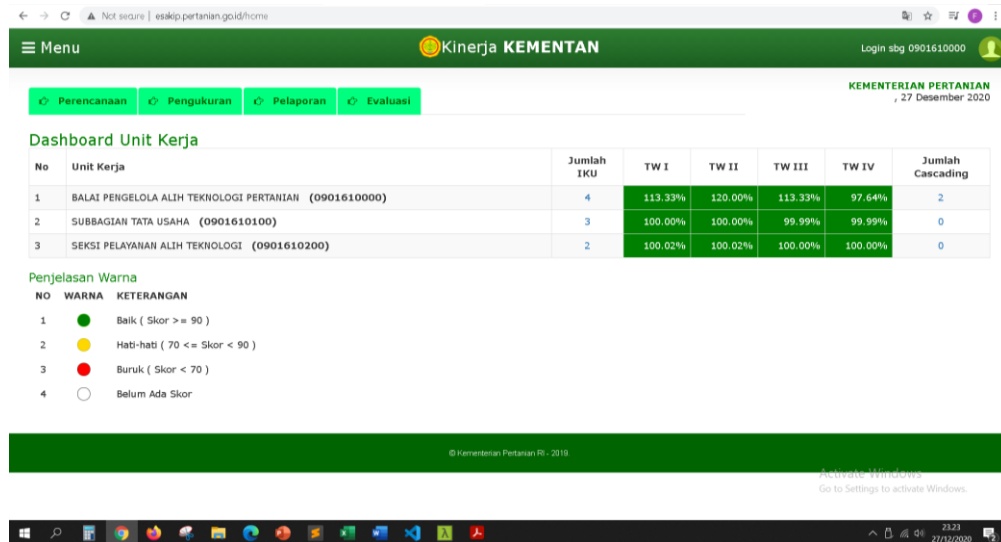
Gambar 7. Aplikasi SMART DJA

- Update capaian kinerja dan realisasi pada aplikasi monev Bappenas, setiap 1 bulan sekali



Gambar 8. Aplikasi Monev Bappenas

8. Update capaian kinerja dan realisasi pada aplikasi SAKIP, setiap 1 bulan sekali



Gambar 9. Aplikasi SAKIP

lingkup Balai PATP yaitu: (1) Kegiatan Pengkajian 2 proposal; (2) Kegiatan Diseminasi 2 proposal; (3) Manajemen 7 proposal; dan (4) Layanan Internal 2 proposal, yang diuraikan pada tabel 1. Monitoring dan evaluasi terhadap 4 obyek yang terdiri atas 13 proposal tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan formulir monev yang dibagikan ke masing-masing penanggung jawab/PIC kegiatan dan dilaporkan setiap bulan ke tim monev. Dengan demikian masalah – masalah yang timbul untuk mencapai target 45 HKI dan 10 perjanjian lisensi dapat segera diatasi dari kegiatan mana yang belum sesuai target capaiannya.

Tabel 1. Judul kegiatan, keluaran dan besarnya alokasi dana Balai PATP tahun 2020

NO	JUDUL RPTP/RDHP/RKTM DAN KEGIATAN	KELUARAN	KEBUTUHAN BIAYA (Rp 000)
		2020	usulan 2020
1	2	8	12
1.	Pengkajian Kegiatan:		

	a.	Analisis Kebijakan dalam rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri	1. TKT. 2. Percepatan izin edar. 3. Revisi Permentan terkait penilaian ATB.	270.900
	b.	Pengkajian dan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Taman Teknologi Pertanian)	1. Kajian Pakan Probiotik 2. Kajian Alat IB dan Alat Tetas Mesin Sederhana 3. Kajian Plasma Domba dan Ayam Kampung	230.750
2.	Diseminasi			
	Kegiatan:			
	a.	Percepatan Proses Perlindungan HKI Untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi oleh Industri	1. Terprosesnya 45 (empat puluh lima) pendaftaran HKI (paten, hak cipta, merek, PVT). 2. Terselenggaranya Sosialisasi HKI 3. Terselenggaranya kegiatan pemanduan penyusunan draft dokumen HKI dan asistensi perbaikan deskripsi paten untuk mempercepat proses perlindungan HKI.	1.550.000
	b.	Pembinaan Taman Agroinovasi dan Agrimart (Agro Inovasi Mart) Balitbangtan	1.	50.000
	c.	Kerjasama Lisensi Inovasi Balitbangtan (Perubahan dari : Promosi teknologi hasil litbang pertanian dan fasilitasi kerjasama lisensi dalam rangka alih teknologi kepada industri)	1. Terfasilitasinya 10 perjanjian kerjasama lisensi; 2. Terlaksananya <i>update</i> pemetaan kegiatan alih teknologi dengan mitra. 3. Tersusunnya buku kekayaan intelektual dan alih teknologi Balitbangtan. 4. Terlaksananya kegiatan pemantauan untuk invensi yang telah dikerjasamakan.	1.933.456
3	Manajemen			
	Kegiatan:			

	a.	Sinkronisasi Program dan Monitoring Evaluasi Balai PATP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rumusan output tahun 2020 dalam bentuk matrik rencana kegiatan. 2. Tersusunnya rumusan kebutuhan anggaran kegiatan T.A. 2021. 3. Menyusun proposal tahun 2021 dan melakukan evaluasi proposal 4. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai PATP. 5. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6. Tersusunnya laporan tengah tahun dan tahunan Balai PATP 	129.500
	b.	Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan dan upload kegiatan substantif balai secara reguler. 2. Informasi publik terkait pengelolaan KI dan lisensi. 3. Peningkatan kapasitas bandwidth koneksi jaringan. 4. Penyempurnaan Website Balai PATP 	188.000
	c.	Penerbitan dan Penyebaran Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua nomor IJAS Vol. 21 (1-2), 2020. 2. Dua nomor JP3 Vol. 39 (1-2), 2020. 3. Delapan nomor Warta Litbang Pertanian Vol. 39 (1-8), 2020. 	791.500
	d.	Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Administrasi DIPA Balai PATP	Tersedianya dokumentasi administrasi keuangan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dalam bentuk elektrik secara berkesinambungan sehingga dapat diakses oleh manajemen bilamana diperlukan.	160.000
	e.	Koordinasi Pemanfaatan PNPB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan royalti yang berasal dari 	660.825

			lisensi alih teknologi oleh inventor yang telah disetorkan sebagai PNBP tahun 2020. 2. Terlaksananya pembayaran imbalan royalti. 3. Terlaksananya pembayaran bagian UK/UPT dan unit alih teknologi atas royalti yang telah disetorkan sebagai PNBP sesuai PMK No. 72 tahun 2015.	
	f.	Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Manajemen Mutu	1. Seluruh pegawai Balai PATP bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan administrasi yang tertib dan lengkap 2. Pelaksanaan kegiatan bisa tepat sasaran, efektif dan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran 3. Terciptanya kepuasan pelanggan dengan standar kualitas pelayanan masyarakat oleh Balai PATP 4. Dipahaminya komitmen pimpinan, kebijakan dan prosedur kerja yang akan dilaksanakan 5. Terlaksananya audit intern dan audit ekstern ISO 9001 : 2015 6. Terpeliharaan sertifikat ISO 9001 : 2015 untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan profesionalitas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik	111.000
	g.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	1. Terlayannya hak-hak PNS sesuai peraturan yang berlaku. 2. Terpenuhinya Jumlah	224.069

			pegawai sesuai kemampuan yang diperlukan. 3. Meningkatnya tingkat disiplin PNS. 4. Meningkatnya ketrampilan PNS. 5. Tertatanya arsip dan dokumen Balai PATP dengan baik.	
4.	Layanan Internal			
	Kegiatan :			
	a.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran	Terfasilitasinya Perangkat Pengolah Data dan Alat Studio dan Komunikasi yang memadai dalam kegiatan operasional perkantoran; tersediannya sarana perlengkapan kantor yang memadai	500.000
	b.	Layanan Perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana/fasilitas kantor yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai PATP sebagai pengelola Alih Teknologi Pertanian	3.825.161
JUMLAH				10.625.161

Pemantauan terhadap ketiga objek tersebut dapat diimplementasikan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap *ex-ante*, *on going*, dan *ex-post*

a. Monev perencanaan (*ex-ante*)

Indikator pengukuran pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tahap *ex-ante* dimulai dari mempelajari, memeriksa, meneliti dan mengkaji secara seksama terhadap proposal kegiatan/penelitian serta diskusi langsung dengan penanggung jawab dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan/Peneliti. Indikator tersebut meliputi tingkat kesesuaian antara input dan output, manfaat yang diharapkan dengan masukan yang diperlukan (SDM, dana dan waktu), termasuk kelengkapan administrasi, fasilitas/sarana yang cukup dan memenuhi persyaratan teknis. Monev perencanaan diarahkan pada kelengkapan dokumen kegiatan/program, kejelasan target dan sasaran kegiatan/program, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan penggunaan sumberdaya.

b. Monev pelaksanaan (*on-going*)

Monev tahap pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi pelaksanaan kegiatan/program dengan rencana yang telah ditetapkan serta melihat keluaran yang dihasilkan dari setiap tahapan kegiatan. Indikator pengukuran pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tahap *on-going* dimulai dari identifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung dibandingkan dengan proposal kegiatan/penelitian. Aspek yang dimonitor adalah: implementasi metodologi, kesesuaian antara rencana dan realisasi, status kegiatan, permasalahan yang ada.

Alat yang digunakan (*tool*) untuk mengukur aspek-aspek diatas adalah: proposal kegiatan, rapat bulanan, diskusi dan peninjauan lapang (jika diperlukan). Untuk lebih memudahkan dan mengoptimalkan monitoring kegiatan penelitian, agar Tim Monev selalu aktif dan berinteraksi dengan Penanggung Jawab dan pelaksana teknis kegiatan untuk mendapatkan bahan dan informasi tentang perkembangan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dibawa kedalam rapat bulanan Tim MONEV dan selanjutnya didiskusikan bersama-sama guna penyusunan laporan dan progress kegiatan. Laporan tersebut setiap akhir bulan akan disampaikan kepada Kepala Balai sebagai bahan laporan Monev.

c. Monev akhir kegiatan (*ex-post*)

Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kegiatan/program secara keseluruhan yang dilakukan pada akhir kegiatan/program, yang pada tahap selanjutnya dapat dijadikan referensi menyusun kegiatan tahun berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Program

3.1.1. Review Pelaksanaan dan Penajaman Program Tahun 2020

Review pelaksanaan dan penajaman program tahun 2020 dilakukan agar kegiatan–kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan sesuai dengan pendanaan yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2020 yang diuraikan dalam kertas kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2020. Sebagai langkah awal berlangsungnya kegiatan di tahun 2020, telah dilakukan seminar proposal kegiatan tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2020. Jumlah proposal yang diseminarkan pada tahun 2020 sebanyak 13 Proposal yang sumber dananya berasal dari DIPA Balai PATP tahun 2020, baik Rupiah Murni ataupun bantuan (hibah). Bersamaan dengan kegiatan seminar proposal ini juga telah dilakukan monev *ex ante*. Pada tahap monev *ex ante* dilakukan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan dari masing-masing penanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap penanggung jawab telah merencanakan kegiatan masing-masing selama tahun anggaran berjalan. Selain itu dengan pemaparan tersebut dapat dilihat kesesuaian dari setiap kegiatan dengan anggaran biaya yang tersedia dalam DIPA, sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan berjalan.

Monev perencanaan (*ex-ante*) diarahkan pada kelengkapan dokumen kegiatan/program, kejelasan target dan sasaran kegiatan/program, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan penggunaan sumberdaya. Judul kegiatan, keluaran dan alokasi anggaran tahun 2020 disajikan pada Tabel 1. Dari hasil monev *ex-ante* dapat dilihat bahwa masing-masing kegiatan telah merencanakan penggunaan anggaran sesuai dengan output yang diharapkan. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam matrik rencana kegiatan selama satu tahun berjalan.

3.1.2. Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan 2020

Sumber belanja Balai PATP TA 2020 berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai PATP TA 2020 sebesar Rp. 10.625.161.00,-, namun pada bulan mei terjadi refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19, sehingga anggaran Balai PATP menjadi 8.827.461.000 dan pada bulan juni anggaran Balai PATP Kembali adanya pemotongan anggaran/refocusing sehingga berdampak pada IKU Balai dan anggaran menjadi 6.583.336.000. Bulan September terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 59.200.000 yang bersumber dari Balitbangtan sehingga DIPA Balai PATP menjadi Rp. 6.642.536.000,-. Anggaran Balai PATP pada bulan Oktober meningkat menjadi Rp. 8.656.979.000 yang anggarannya bersumber dari PNBP. Revisi PNBP tahap 3 dan penambahan anggaran dari Balitbangtan sebesar Rp. 300.000.000, maka anggaran Balai PATP kembali naik menjadi Rp. 9.077.213.000. Realisasi Belanja Balai PATP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.809002.764,- atau 97,05%. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk semua kegiatan mayoritas diatas 99%.

Tabel 2. Judul kegiatan, pagu dan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2020, berdasarkan revisi anggaran terakhir

NO		JUDUL RPTP/RDHP/RKTM DAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM DIPA	REALISASI	PRESENTAS E
1809.203 Inovasi yang didaftarkan perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi					
	a.	Percepatan Proses Perlindungan HKI Untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi oleh Industri	803.000.000	802.485.000	99.94%
1809.204 Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan					
	a.	Kerjasama Lisensi Inovasi Balitbangtan	478.500.000	476.994.805	99.69%
	b.	Analisis Kebijakan dalam rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri	142.000.000	141.124.100	99.38%
	c.	Kajian Program Strategis Dan Dampak Penerapan Teknologi Kementerian Pertanian	21.000.000	20.900.000	99.52%
1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					
Penyusunan rencana program, dan penyusunan rencana anggaran					
	a.	Sinkronisasi Program dan Monitoring Evaluasi Balai PATP	90.000.000	89.788.500	99.77%

Pengelolaan Data Dan Informasi					
	a.	Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan	95.900.000	95.763.000	99.86%
	b.	Penerbitan dan Penyebaran Publikasi	284.250.000	283.384.000	99.70%
Pengelolaan Keuangan					
	a.	Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Administrasi DIPA Balai PATP	118.200.000	117.982.035	99.82%
Pengelolaan Kepegawaian					
	a.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	70.500.000	70.293.750	99.71%
Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen Balitbangtan					
	a.	Koordinasi Pemanfaatan PNPB	1.762.743.000	1.722.421.450	97.88%
	b.	Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Manajemen Mutu	44.000.000	43.774.500	99.49%
Layanan Internal					
	a.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran	1.032.759.000	1.017.999.656	99.85%
	b.	Layanan Perkantoran	4.134.361.000	3.916.516.968	94.73%
			9.077.213.000	8.809.002.764	97.05%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.500941/2020



0630723017-0753-0011

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (018) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (09) | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN |
| 3. Provinsi | : | (02) | JAWA BARAT |
| 4. Kode/Nama Saklar | : | (500941) | BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR |
| Sebesar | : | Rp. 9.077.213.000 | (SEMBILAN MILIAR TUJUH PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.09.12 Program Peningkatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

018.09.12.1509 Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.281.711.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNPB TA Berjalan	Rp.	2.795.502.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencatatan dan dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN B O G O R | (023) Rp. | 9.077.213.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196806111962021001

Gambar 10. Petikan DIPA T.A. 2020 (Revisi 6)

3.1.3. Perencanaan Anggaran T.A. 2021

Penyusunan anggaran 2021 dimulai dengan menyusun rincian rencana kerja yang selanjutnya akan disandingkan dengan data matriks. Penyesuaian selanjutnya akan dituangkan dalam pengisian ADK RKAKL untuk anggaran tahun 2021.

3.1.4. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting dalam mengukur kinerja atas capaian output yang dihasilkan. Dalam melakukan upaya evaluasi dan monitoring kegiatan telah disiapkan beberapa aplikasi pendukung, yang dibahas sebagai berikut :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Langkah pertama dalam evaluasi dan monitoring adalah penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan **e-PK** dan **e-SAKIP** bagi pejabat struktural di masing-masing institusi.

A. e-PK

e-PK adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dan evaluasi output fisik dari indikator kinerja pada tahun berjalan. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, rangkaian input sampai dengan hasil evaluasi seperti dibawah ini;

a. Halaman awal ketika akan memasuki / mengisi e-pk



b. Tampilan informasi Sasaran Kinerja

Daftar Sasaran (SS)

No	Unit Kerja	Kode SS	Sasaran	Jml IK	Aksi
1	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN)	SS1	Terkecilnya Kekayaan Intelektual dan Aih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	2	Lihat Edit
2	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN)	SS2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	1	Lihat Edit
3	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN)	SS3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	1	Lihat Edit

Keterangan :
 Jika jumlah IK tidak sama dengan nol, maka tombol **Hapus** tidak muncul.
 (Data Sasaran tidak bisa di hapus jika sudah digunakan di dalam data Indikator Kinerja)

c. Tampilan informasi Indikator Kinerja

Daftar Indikator Kinerja

No	Unit Kerja	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Aksi
1	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terkecilnya Kekayaan Intelektual dan Aih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	IK1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (inventaris)	Lihat Edit Hapus
2	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terkecilnya Kekayaan Intelektual dan Aih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	IK2	Jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)	Lihat Edit Hapus
3	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	IK3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian (Skala 1-4)	Lihat Edit Hapus
4	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	IK4	Jumlah temuan tjl atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Pengelola Aih Tekn	Lihat Edit Hapus

d. Tampilan informasi Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

No	Unit Kerja	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PK
1	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terkecilnya Kekayaan Intelektual dan Aih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	IK1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (inventaris)	inversi	45.00000000	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terkecilnya Kekayaan Intelektual dan Aih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	IK2	Jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)	Lisensi	10.00000000	<input checked="" type="checkbox"/>
3	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	IK3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian (Skala 1-4)		2.00000000	<input checked="" type="checkbox"/>
4	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Aih Teknologi Pertanian	IK4	Jumlah temuan tjl atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Pengelola Aih Tekn		1.00000000	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Anggaran
 Anggaran (Rupiah)
 1115000000

Gambar 11. Tampilan aplikasi e-kinerja yang menggambarkan kinerja Balai PATP Manual Kinerja untuk pejabat eselon 3 dan 4 sebagai indikator kinerja dari Balai PATP seperti yang digambarkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja dan Manual IKU untuk Kepala Balai PATP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terkelolanya Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	2-1-Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (invensi)	10.00 Invensi
1	Terkelolanya Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	2-2-Jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)	6.00 Lisensi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	1-1-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Skala (1-4))	2.00
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	1-1-Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	1.00

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
Jalan Balok No. 22 Bogor 16151 Telpom : 0251-4382567 / 6362563 Fax : 0251-4382567 / 6362563
E-mail: bpatp@litbang.pertanian.go.id http://www.bpatp.litbang.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ketut Gede Mudiarta
Jabatan : Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 12 Desember 2019

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama


Ketut Gede Mudiarta


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

No	Program / Kegiatan / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline					Target
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (invensi)	45	46	47	48	49	
		2. Jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)	10	11	11	12	13	
		3. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WSKWSDM pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Nilai)	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	
		4. Nilai kinerja Balai PATP berdasarkan PMK yang berlaku)	19	19,5	20	20,25	20,5	

KEGIATAN		ANGGARAN
Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian		
Invensi yang dihasilkan: Perlindungan HKI, Promosi, Naskah Perjanjian Lisensi		Rp. 10.625.161.000

Bogor, 12 Desember 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadry Djufry

Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Ketut Gede Mudiarta

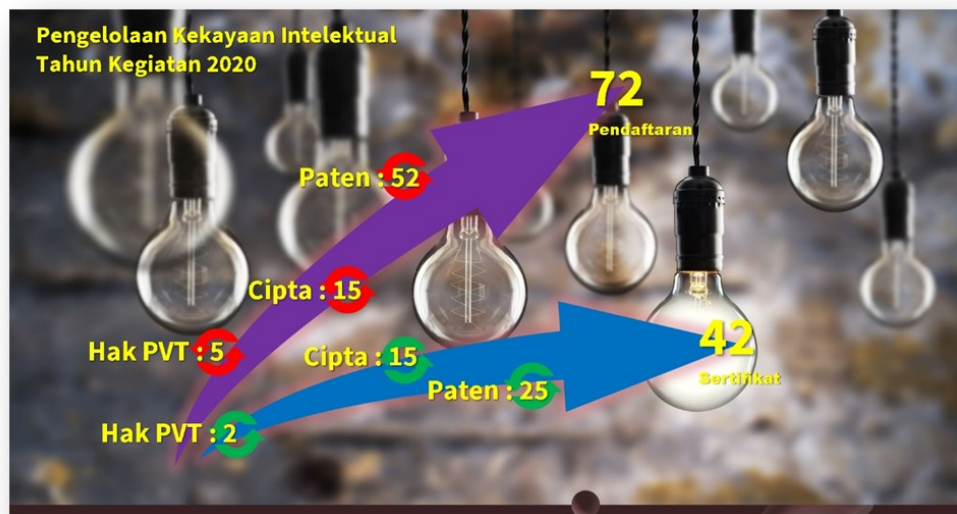
MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Teknikerna Kelayakan Intelektual dan Ahi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah faena hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang telah intelektual (faena) (akumulasi 5 tahun terakhir)
Bentuk realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan dan dokumen kerjasama faena dari hasil penelitian dan pengembangan dalam 5 tahun terakhir (3-6 hingga 5)
Formula/Cara menghitung	\sum realisasi kerjasama faena yang telah ditandatangani para pihak (3-5 hingga 5)
Klasifikasi target	Maksimal
Sumber data	Data PAKT (Berkas realisasi kerjasama faena)
Cara pengumpulan data	Jumlah realisasi kerjasama faena yang telah ditandatangani antara pihak (SK/KPT) dan dalam 5 tahun terakhir.
Catatan khusus	Proses sampai dengan ditandatanganinya masing-masing perjanjian kerjasama oleh para pihak
Pihak yang melakukan pengumpulan IKSK/sumber IKSK	Data PAKT

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tercapainya Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Desa Pengadai dan Telingan Pematang
Indikator	Desa SK
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rumah teler yang implementasi SAKIP yang terbagi menjadi 3 jenis SAKIP sesuai Permen/PK No Nomor 12 tahun 2015 meliputi: pengumpulan, pengolahan, pengolahan limbah, insulasi internal, dan capaian kinerja di tingkat Desa Pengadai dan Telingan
Formulir realisasi/pencapaian IKSK	Laporan rumah teler apa implementasi SAKIP
Formula Cara menghitung	Jumlah rumah teler yang terbagi = jumlah teler yang terbagi A + jumlah teler yang terbagi B + + jumlah teler yang terbagi N
Formula target	Minimale
Sebaran data	Inspektur Jendral
Cara pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey rumah teler terhadap implementasi SAKIP pada tahun II (II dan tahun sebelumnya 0-1) 2. Berdasarkan rumah pada tahun – tahun tersebut berdasarkan apa yang 3. Bila terbagi rumah – teler pada apa yang sama di kedua tahun tersebut maka dibikin 1 (satu) rumah terbagi 4. Indikator semua rumah terbagi yang sebelumnya di tahun
Catatan khusus	<p>Terdapat tiga yang diukur dalam indikator tersebut berdasarkan laporan keuangan terbagi 3 (tiga) jenis SAKIP sesuai Permen/PK No 12 Tahun 2015 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan limbah • Pengolahan limbah • Pengolahan limbah • Capaian kinerja • Evaluasi kinerja
Hubung yang melibatkan pengontrolan	Inspektur Jendral

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian yang diperoleh dengan target yang telah ditentukan pada tahun awal anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap tiga sasaran kegiatan yaitu (a) Pengajuan permohonan KI dari hasil penelitian dan pengembangan yang didaftarkan ke Ditjen KI dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP); (b) Jumlah kerjasama lisensi yang telah disepakati antara pihak UK/UPT dalam 5 tahun terakhir; (c) Kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB nomor 16 tahun 2014; dan (d) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai PATP.

a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (invensi)

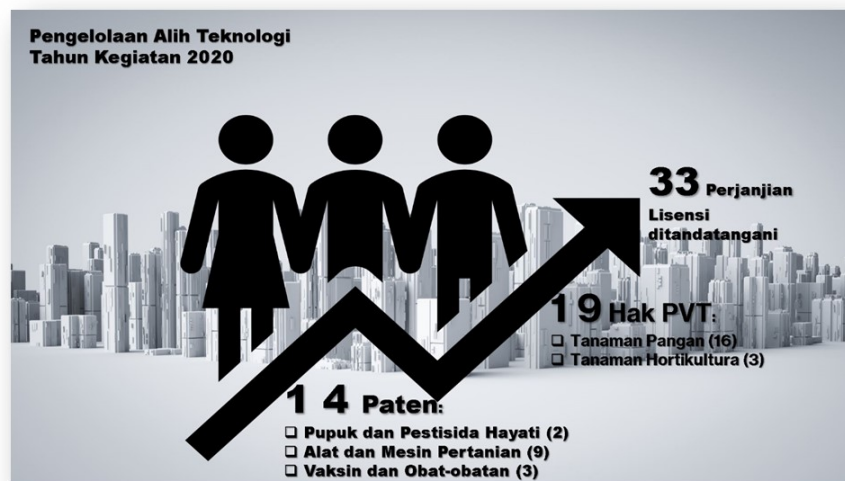
Target capaian perlindungan HKI yang didaftarkan melalui Ditjen KI dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) mulai tahun 2014 dengan target per tahunnya adalah 45 pendaftaran, namun realisasinya mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 capaian target pendaftaran KI sebesar 750% dengan jumlah pendaftaran 75 invensi dari target 10 invensi. Gambaran capaian pendaftaran KI dengan pemenuhan rasio pelayanan terhadap pengajuan pendaftaran KI ditampilkan pada grafik 1 berikut.



Gambar 13. Gambaran output dari indikator jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang terdaftar HKI (invensi)

b. Jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)

Indikator utama berikutnya adalah jumlah kerjasama lisensi dari hasil penelitian Balitbangtan yang telah didaftarkan HKI. Target capaian jumlah lisensi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah 10 naskah kerjasama lisensi, namun pada tahun 2020 target capaian lisensi menurun menjadi 6 naskah akibat adanya refocusing anggaran . Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pun melampaui target yang telah ditetapkan, yakni 550% dengan jumlah pendaftaran 33 perjanjian kerjasama lisensi. Gambaran capaian target kerjasama lisensi dengan rasio pelayanan permohonan kerjasama lisensi digambarkan pada grafik 2 berikut.



Gambar 14. Capaian output dari indikator jumlah lisensi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (naskah lisensi)

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Indikator ini diukur atas layanan publik. Pada tahun 2020 ditargetkan mencapai nilai 2 (skala likert 1-4), sedangkan realisasi IKM untuk layanan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian adalah 3,86, atau termasuk dalam katagori **sangat baik**. Unsur yang menjadi penilaian dalam IKM ini adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosuder
3. Waktu Penyelesaian

4. Biaya/ Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

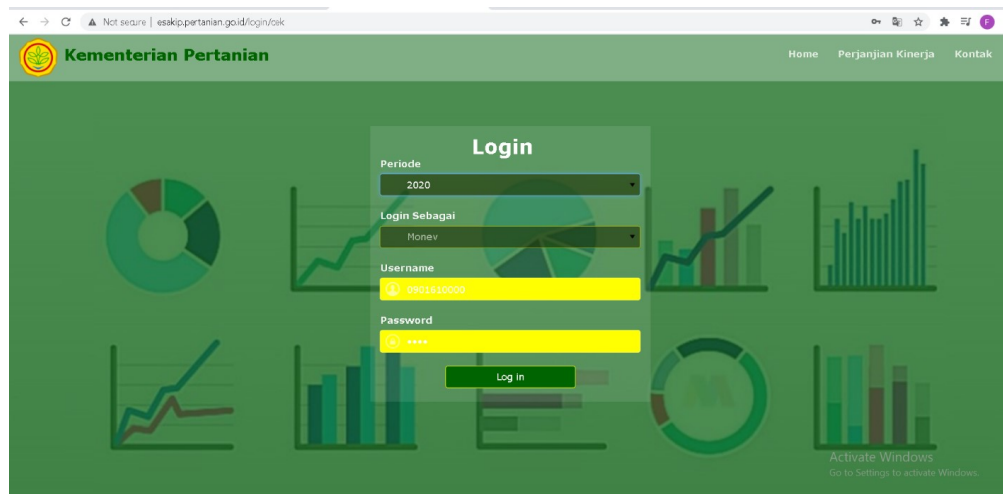
d. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Pada indikator ini dapat dilaporkan bahwa di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian tidak ada temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

B. e-SAKIP

e-SAKIP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dan evaluasi output anggaran pada tahun berjalan. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, rangkaian input sampai dengan hasil evaluasi seperti dibawah ini:

a. Tampilan awal ketika akan masuk/e-SAKIP



b. Tampilan kinerja sampai dengan TW 4

Kinerja KEMANTAN Login sbg 0901610000

KEMENTERIAN PERTANIAN, 3 Januari 2021

Dashboard Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah IKU	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Cascading
1	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN (0901610000)	4	113.33%	120.00%	113.33%	97.64%	2
2	SUBBAGIAN TATA USAHA (0901610100)	3	100.00%	100.00%	99.99%	99.99%	0
3	SEKSI PELAYANAN ALIH TEKNOLOGI (0901610200)	2	100.02%	100.02%	100.00%	100.00%	0

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1	●	Baik (Skor >= 90)
2	●	Hati-hati (70 <= Skor < 90)
3	●	Buruk (Skor < 70)
4	○	Belum Ada Skor

c. Capai output rencana aksi

Kinerja KEMANTAN Login sbg 0901610000

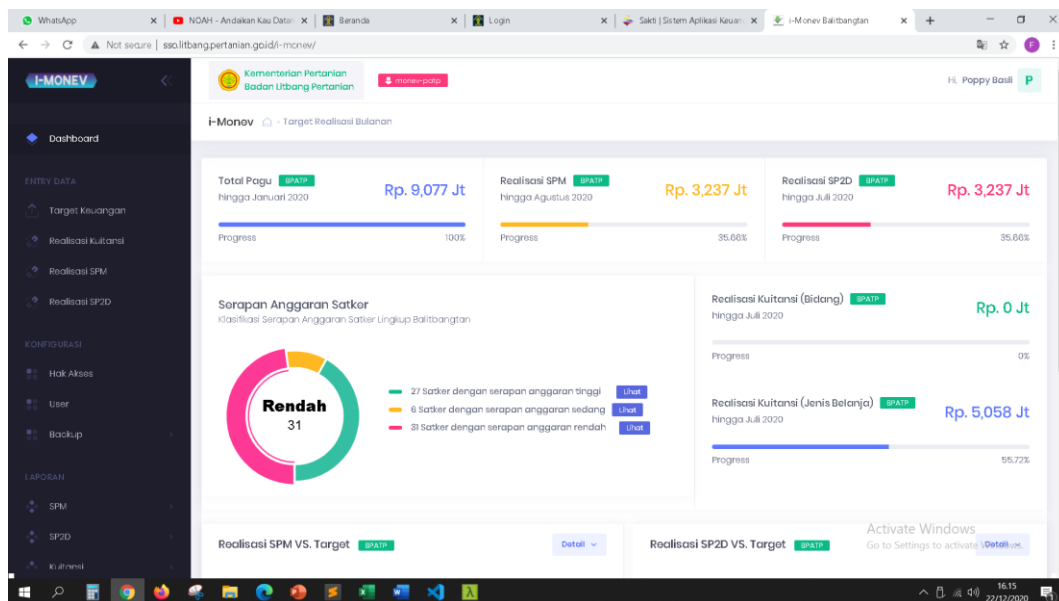
Rincian Pagu
Satker : BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR (500941)

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	PAGU	REALISASI	%
12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	6,583,336,000	4,666,982,603	70.89
1809 Dukungan Manajemen Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	6,583,336,000	4,666,982,603	70.89
1809.203 Inovasi yang didaftarkan perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	803,000,000	747,166,000	93.05
500941.1809.203.003 Perlindungan HKI untuk meningkatkan adopsi teknologi oleh industri	803,000,000	3,712,430,000	462.32
051 Percepatan Proses Perlindungan HKI untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi oleh Industri Target ✓ (Mendukung 9 IKU)	803,000,000	747,166,000	93.05
1809.204 Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	591,500,000	444,569,100	75.16
500941.1809.204.003 Kerjasama Lisensi Inovasi Balitbangtan	591,500,000	2,212,127,500	373.99
051 Kerjasama Lisensi Inovasi Balitbangtan Target ✓ (Mendukung 2 IKU) Realisasi...	478,500,000	372,450,100	77.84
052 Analisis Kebijakan Dalam Rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri Target ✓ (Mendukung 2 IKU) Realisasi...	92,000,000	57,414,000	62.41
053 Kajian Program Strategis dan Dampak Penerapan Teknologi Kementerian Pertanian Target ✓ (Mendukung 2 IKU) Realisasi...	21,000,000	14,705,000	70.02
1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,363,675,000	864,489,737	63.39
500941.1809.950.001 Manajemen Kegiatan Balitbangtan	1,363,675,000	4,237,283,685	310.73

Gambar 15. Gambar pada bagian a, b, c di atas adalah rangkaian aplikasi e-sakip

2. Update Realisasi di Aplikasi i-monev

Update realisasi di aplikasi i-monev berdasarkan realisasi SP2D, SPM dan realisasi kuitansi bendahara pengeluaran yang diisi setiap hari sampai dengan bulan Desember 2020.



Intranet Badan Litbang Pertanian User: money-patp | Logout

Home Money Lap. SP2D Lap. SPM Target & Realisasi Keuangan

Target & Realisasi Keuangan Tahun 2018

Unit Kerja: - Semua - Cari

2018 2017 2016 2015 2014 ... 2011 >

No	UK/UPT	Pagu	Realisasi SPM			Realisasi SP2D		
			s/d	Rp.	%	s/d	Rp.	%
1	BPATP	13.372	Des	13.191	99%	Des	13.191	99%
				13.372	100%		13.372	100%
Total:		13.372	Des	13.191	99%	Des	13.191	99%

2018 2017 2016 2015 2014 ... 2011 >

Laporan Realisasi SP2D » Satker

Bulan: Desember 2018 Pecahan: Rupiah Ribuan Jutaan Milyar Belanja Barang: ☒ Operasional/Non ☐ Realisasi Urutkan: Ubah

[« Kembali](#)

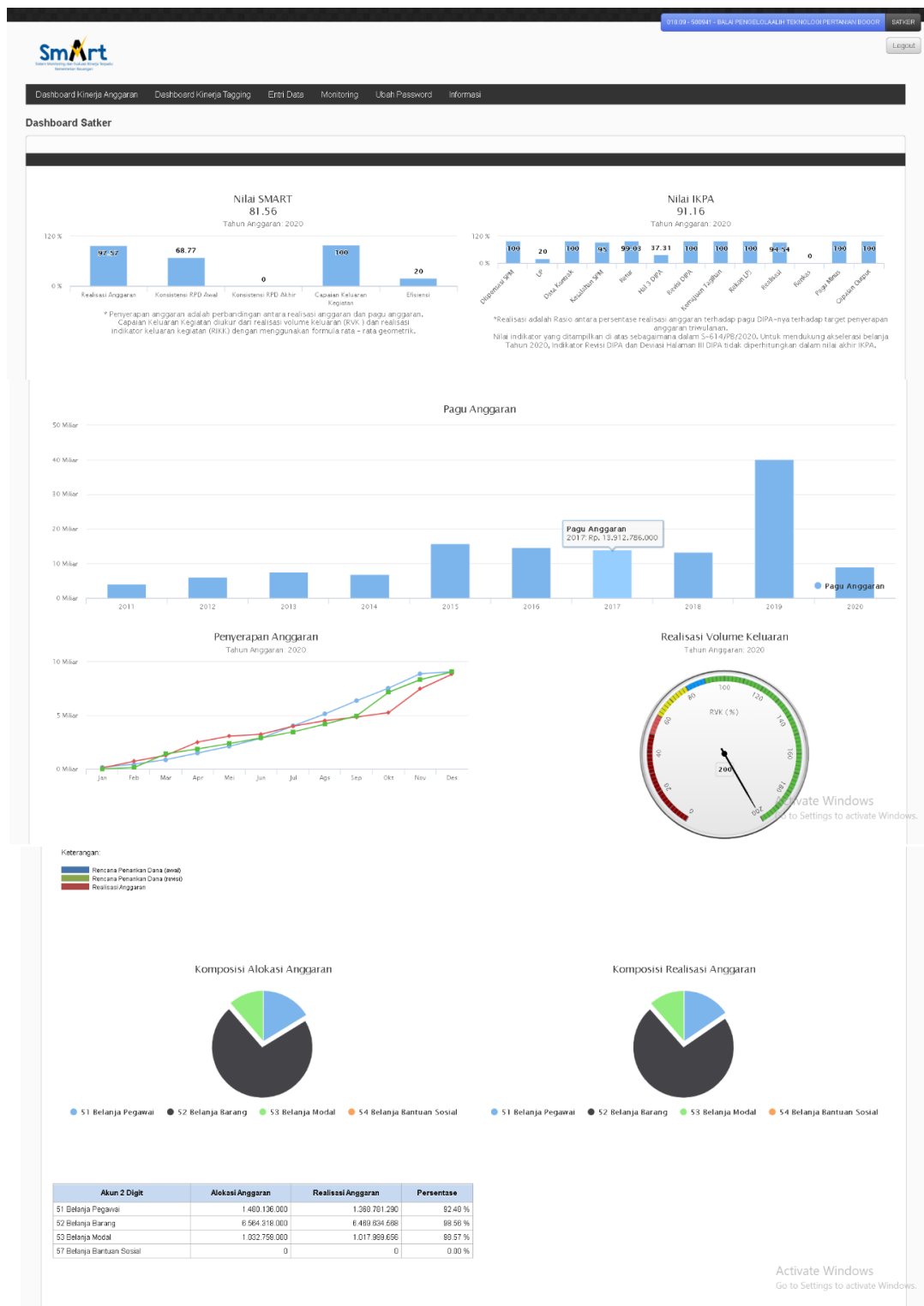
Realisasi SP2D Satker Lingkup Badan Litbang pada Desember 2018 dalam Ribuan Rupiah

No.	Satker	Pagu Anggaran	Pagu Per Belanja				Realisasi Per Belanja									
			Pegawai	Barang Ops	Barang Non	Modal	Pegawai	%	Barang Ops	%	Barang Non	%	Modal	%	Total	%
1	BPATP	13.371.503	1.561.971	2.138.117	6.760.786	2.910.629	1.463.968	93,73%	2.091.143	97,80%	6.748.626	99,82%	2.886.840	99,18%	13.190.577	98,65%
	Jumlah	13.371.503	1.561.971	2.138.117	6.760.786	2.910.629	1.463.968	93,73%	2.091.143	97,80%	6.748.626	99,82%	2.886.840	99,18%	13.190.577	98,65%

Gambar 16. Gambar diatas menampilkan rangkaian update realisasi melalui aplikasi i-monev melalui SP2D, SPM dan realisasi kuitansi bendahara pengeluaran

3. Update capaian kinerja pada aplikasi monev DJA-Kemenkeu

Aplikasi ini diisi setiap 1 bulan sekali. Dari proses update aplikasi ini diperoleh informasi seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



→

Not secure | monev.anggaran.kemtan.go.id/2020/index.php/satker/detail_giat_bulan_konf/12/1809/01

<

Gambar 17. evaluasi serapan anggaran dari Ditjen Anggaran

4. Update i-program

Masuk ke website <http://sso.litbang.pertanian.go.id/i-program-v3/renja>

Not secure | sso.litbang.pertanian.go.id/i-program-v3/renja

Kementerian Pertanian
Badan Litbang Pertanian

H. Poppy Basli

i-Program Rencana Kerja

Rencana Kerja

Tampilkan + Rencana Kerja Pencarian

No	Ti	Jenis	Ti	Tahun	Ti	Satker	Ti	Tahapan	Ti	Judul	Ti	Biaya	Ti	Action	Ti
1		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2021.5 - Pengadaan Kendaraan Bermotor		353.700.000		<input type="button" value="D"/>	
2		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2021.3 - Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan		198.017.000		<input type="button" value="D"/>	
3		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2021.4 - Pengadaan Peralatan Pendukung AWR		300.000.000		<input type="button" value="D"/>	
4		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2014.15 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		220.500.000		<input type="button" value="D"/>	
5		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2014.14 - Layanan Perkantoran		3.860.000.000		<input type="button" value="D"/>	
6		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2021.2 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		239.800.000		<input type="button" value="D"/>	
7		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2015.13 - Koordinasi Pemanfaatan PHBP		609.636.000		<input type="button" value="D"/>	
8		RKTM		2021		BPATP		UPT		161.2011.16 - Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Manajemen Mutu (SMK) Balai PATP		Setelah 194.000.000		<input type="button" value="D"/>	

Gambar 18. Update i – program

5. Update data Bappenas

Aplikasi ini diupdate setiap 1 bulan sekali. Dari proses update aplikasi ini diperoleh informasi seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.

1. BERANDA

USER K8
Satuan Kerja

ELECTRONIC MONITORING & EVALUATION

SATKER 500941
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR

KINERJA SATKER BERDASARKAN AKUNTABILITAS KEPATUHAN PELAPORAN

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Jln Salak No. 22 Bogor

2. PEMANTAUAN

USER K8
Satuan Kerja

SATUAN KERJA : [500941] - BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [018] - KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA ESELON I : [09] - Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
PROVINSI : [02] - JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : [52] - KOTA BOGOR

OUTPUT KEGIATAN

KODE & NOMENKELATUR	STATUS KELENGKAPAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1809 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian												
1809.203 Invensi yang terdaftar perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi												
1809.204 Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Riset/Bangunan												
1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I												
1809.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
1809.994 Layanan Perkantoran												

← → ↻ e-monev.bappenas.go.id/2020/home#

eMONEV 2. PEMANTAUAN

USER K8
Satuan Kerja

[Beranda](#)
[Pemantauan](#)
[Pratinjau Laporan](#)
[Cetak Laporan](#) +
[Unduh Data Excel](#)

DASHBOARD REALISASI KOMPONEN (BULANAN)

NO	BULAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK	STATUS PELAKSANAAN		#aksi
		RUPIAH	% (Pangsa)		KATEGORI	% (Kumulatif)	
1	JANUARI	Rp. 0	0.00 %	1	Perencanaan	5.00 %	
2	FEBRUARI	Rp. 11,150,000	1.39 %	3	Perencanaan	10.00 %	
3	MARET	Rp. 650,591,000	81.02 %	3	Pelaksanaan	44.00 %	
4	APRIL	Rp. 20,000,000	2.49 %	8	Pelaksanaan	48.00 %	
5	MEI	Rp. 3,600,000	0.45 %	8	Pelaksanaan	50.00 %	
6	JUNI	Rp. 28,345,000	3.53 %	6	Pelaksanaan	55.00 %	
7	JULI	Rp. 10,080,000	1.26 %	4	Pelaksanaan	60.00 %	
8	AGUSTUS	Rp. 23,400,000	2.91 %	3	Pelaksanaan	65.00 %	
9	SEPTEMBER	Rp. 5,750,000	0.72 %	6	Pelaksanaan	70.00 %	
10	OKTOBER	Rp. 6,554,000	0.82 %	3	Pelaksanaan	75.00 %	
11	NOVEMBER	Rp. 29,165,000	3.63 %	2	Pelaksanaan	88.00 %	
12	DESEMBER	Rp. 14,050,000	1.75 %	25	Pelaksanaan	99.00 %	
TOTAL		Rp. 802,685,000	99.96 %	72	Pelaksanaan	99.00 %	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 19. Update Monev Bappenas

IV. KESIMPULAN

Sumber belanja Balai PATP TA 2020 berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). DIPA Balai PATP pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.625.161.000,-, namun pada bulan Mei terjadi refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19, sehingga anggaran Balai PATP menjadi 8.827.461.000 dan pada bulan Juni anggaran Balai PATP Kembali adanya pemotongan anggaran/refocusing sehingga berdampak pada IKU Balai dan anggaran menjadi 6.583.336.000. Pada akhir tahun 2020 terjadi penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP sehingga DIPA Balai PATP menjadi Rp. 9.077.213.000,-. Sementara itu realisasi Belanja Balai PATP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.809.002.764,- atau 97,05%

Kegiatan Balai PATP pada tahun 2020, mulai dari pengelolaan HKI dan perjanjian lisensi dan kegiatan pendukung lainnya telah memenuhi target yang diharapkan, baik dari penyerapan anggaran maupun target output. Keberhasilan pencapaian output Balai PATP tercermin pula dari hasil indeks kepuasan masyarakat yang sangat baik. Capaian-capaian pada tahun 2020 menjadi strategi yang akan terus diterapkan dan diperbaiki dalam mencapai output pada tahun anggaran 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriadi, A., dkk, 2011, Panduan Monitoring dan Evaluasi (MONEV), Bogor, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Haryono, dkk, 2011, Pedoman, Pengelolaan Anggaran APBN, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian No.31/2010, Pedoman Sistem Pemantuan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Pertanian, 2010, Kementerian Pertanian, Jakarta, Kementerian Pertanian.
- , 2010, Panduan Workshop LAKIP bagi Eselon II dan UPT Lingkup Kementan, Jakarta, Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan /OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.